

Polda Tampung Informasi Komnas HAM



● UMAR MUKHTAR,
ARIF SATRIO NUGROHO

JAKARTA — Polda Metro Jaya siap menampung segala informasi yang akan diberikan oleh tim pemantau kasus Novel Baswedan bentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung kepolisian dalam penyidikan kasus Novel.

"Semua informasi yang dilakukan masyarakat atau lembaga yang ada untuk kepolisian kita tampung," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (18/3).

Argo mengatakan, polisi nantinya akan menindaklanjuti informasi apa pun yang diterima tersebut. Bila informasi tersebut cocok dan dapat mendukung proses penyidikan, polisi pun akan mengolah informasi tersebut.

Hingga saat ini, tim pemantau kasus Novel Baswedan belum melakukan koordinasi formal dengan penyidik Polda Metro Jaya. Saat ini, Polda Metro Jaya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan tim tersebut. "Kita tunggu saja," ucap Argo singkat.

Pada Jumat (9/3), Komnas HAM

telah membentuk Tim Pemantau Kasus Novel Baswedan untuk mendorong percepatan penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Tim bentukan sidang paripurna Komnas HAM terkait proses hukum kasus Novel Baswedan itu diisi antara lain M Choirul Anam, Franz Magnis Suseno, Ahmad Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, Alissa Wahid, Abdul Munir Mul Khan, dan Bivitri Susanti.

Tim tersebut sudah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi lebih lanjut soal penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Sandrayati yang menjadi anggota Tim Pemantau Kasus Novel menyatakan, tim akan segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sebagai pihak yang menangani kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu.

"Dalam proses. Jadi, koordinasi informal sudah mulai, tetapi formal akan disegerakan," ungkap Sandrayati. Pada Selasa (13/3), Novel telah dimintai keterangan oleh Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan di kantor Komnas HAM, Jakarta, terkait peristiwa penyerangan dengan air keras terhadap dirinya.

Sementara, mantan ketua KPK Busyro Muqoddas mempertanyakan langkah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang lebih memilih menyorot persoalan penundaan pengumuman tersangka dari kalangan calon kepala daerah (cakada) 2018.

Seharusnya, lanjut Busyro, pemerintah lebih menyoroti kasus penyerangan Novel Baswedan yang tak kunjung selesai. Caranya dengan membentuk TGPF atas penyerangan terhadap Novel.

"Mengapa pemerintah diam saja untuk membentuk TGPF? Mengapa di sektor ini Pak Wiranto selaku menteri senior dari Orde Baru, (pernah menjadi) pangab bahkan, yang sekarang dipercaya lagi oleh Jokowi justru tidak menyoroti TGPF itu? Padahal, dia punya kewajiban moral," tutur dia, Ahad (18/3).

Busyro menegaskan, teror yang dialami Novel bukan serangan terhadap pribadi Novel, melainkan kelembagaan, dalam hal ini adalah institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang tugasnya membantu pemerintah dan membela rakyat yang hak-hak ekonominya dirampok oleh koruptor kelas kakap," ujarnya. ■ ed: muhammad hafid